

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI**  
**B I D A N G**  
**PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,**  
**INVESTASI, BSN DAN KPPU**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum VI DPR RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 19 Januari 2011
W a k t u	: Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penyampaian aspirasi dari Ketua Perkumpulan Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) terkait dengan penyelesaian dana pensiun mantan karyawan yang belum dibayarkan. 3. Tanya Jawab; 4. Penutup.
Ketua Rapat	: Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) di dampingi oleh Anggota Komisi VI DPR RI (Dr. Ir. Lili Asjudirejda, SE, P.hD)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Delegasi Ketua Perkumpulan Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) B. .... orang dari 52 orang Anggota

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 15.00 WIB
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Audiensi pada hari ini adalah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) terkait dengan hak-hak pensiun mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang belum dibayarkan.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada perwakilan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia untuk memaparkan aspirasinya.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan dari Ketua Perkumpulan Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

**II. POKOK-POKOK PEMIKIRAN / PEMBICARAAN :**

**KETUA PERKUMPULAN MANTAN KARYAWAN PT. DI**

1. Permasalahan para mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang di PHK pada tahun 2003 dengan SKEP PHK No. 142/03/02/8/PHK/1-2004 tertanggal 29 Januari 2004 sampai saat ini sudah berlangsung selama 7 tahun belum dibayarkan,
2. PT. Dirgantara Indonesia pada saat membayarkan hak Dana Pensiun memakai acuan perhitungan upah tahun 1991 dimana seharusnya mengacu kepada upah terakhir yaitu tahun 2004 sehingga perbedaannya sangat mencolok.

3. Mantan Karyawan sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada Presiden dan para Menteri terkait, dan bahkan berkat bantuan Komisi VI dan Komisi IX pada tahun 2007 sudah mendapatkan alokasi dana APBN sebesar 15 milyar.
4. Mohon dukungan Komisi VI DPR-RI agar pembayaran hak-hak pensiun mantan karyawan PT. DI yang sudah berlarut-latur tersebut dapat segera diselesaikan dan dibayarkan.

### **III. KESIMPULAN**

1. Komisi VI DPR-RI akan segera memprioritaskan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan Deputi Menteri BUMN RI yang terkait beserta Delegasi Perkumpulan Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia untuk membahas penyelesaian masalah pembayaran uang pensiun mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

### **IV. PENUTUP**

Rapat Dengar Pendapat Umum ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 19 Januari 2011

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA  
A-362**